

Dilema *Public Sosial Private Partneship* (PSPP) dalam Penyediaan Infrastruktur Publik

Tomi Setiawan*, dan Nosia Warsa**

*Departemen Administrasi Publik, FISIP Universitas Padjadjaran, Sumedang, Jawa Barat

**Pusat Studi Kebijakan Agraria Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat

Email: tomi.setiawan@unpad.ac.id; nosiawarsa@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:
Accepted

Keywords
publicsocialprivatepartnership,
insfrastruktur publik

ABSTRACT

Paper ini merupakan hasil penelitian yang relatif baru dalam salah satu mazhab administrasipublik, yakni *New PublicGovernance*. Aspek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian iniberkaitan dengan penyediaan infrastruktur publik yang dilakukan melalui mekanisme *Public Social Private Partnership* (PSPP). PSPP secara prinsiptual menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Kabupaten Sumedang merupakan kabupaten yang telah memulai sebuah mekanisme untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan infrastruktur pasar melalui mekanisme PSPP dengan tujuan agar kegiatan pengembangan pasar tersebut dapat terlaksana dalam waktu yang cepat dan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Kajian ini menjadi penting terutama untuk mendapatkan dukungan secara teoritis, maupun secara praktis pada tingkat aktor-aktor yang terlibat.

1. PENDAHULUAN

Mazhab administrasi publik selalu berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Salah satu mazhab yang diterapkan oleh beberapa pemerintah dan daerahsaat ini adalah mazhab *New PublicGovernance* (NPG) yang berkembang sejak awal tahun 2000an¹.

Mazhab ini menjelaskan bahwa perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terbuka dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang semakin terbuka tentunya memberikan kesempatan luas bagi pihak swasta dan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterlibatan multi-aktor dalam mazhab ini terjadi karena

¹ Penting untuk memberikan catatan atas terminologi ini sebagaimana dalam buku *The newpublicgovernance?: EmergingPerspectives on The Theory And Practice of PublicGovernance*, karya Stephen Osborne (2010), bahwa istilah *The New PublicGovernance* merujuk pada 'kebijakan publik dan penyediaan pelayanan publik' dan

digunakan untuk menunjukkan keseluruhan bidang tersebut dari mulai formulasi serta implementasi kebijakan publik dan dalam penyediaan pelayanan publik.

keterbatasan pemerintah dalam sumber daya atau sarana prasarana untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas. Hubungan antar aktor dalam penyelenggaraan pemerintahan tentu akan mempermudah pemerintah untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Salah satu cara untuk melibatkan multiaktor tersebut adalah dengan kerjasama, atau lebih spesifik disebut *Public Social Private Partnership* (PSPP). Kerjasama yang dimaksud adalah antara pemerintah, pihak swasta, dan organisasi sosial masyarakat dalam penyediaan layanan publik.

PSPP melibatkan minimal tiga mitra karena terdapat tiga peran penting yaitu pembiayaan infrastruktur untuk penerapan melalui pengembangan pelayanan publik, menganalisis kebutuhan, ide, koordinasi dari perencanaan melalui pengaturan dan operasi, dan permintaan layanan dari masyarakat sebagai jaminan arus kas dengan menyetujui untuk menggunakan layanan. PSPP menawarkan kesempatan kepada organisasi masyarakat untuk bertindak antara pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan publik. Seluruh aktor terlibat tentu akan menanggung resiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian. Lahirnya

PSPP ini dilatarbelakangi oleh hal perencanaan, pembiayaan, pengembangan, dan kualitas layanan yang bersifat jangka menengah maupun jangka panjang. Model kerjasama ini memiliki kesempatan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan dan mengembangkan layanan yang inovatif.

PSPP dilakukan dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih berkualitas. Salah satu pemerintah daerah yang telah melaksanakan PSPP adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. PSPP di Kabupaten Sumedang dilaksanakan dalam sektor perpasaran. Dalam hasil penelitian Setiawan dan Sukma (2012) dijelaskan bahwa kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta tanpa adanya legitimasi dari organisasi sosial masyarakat berpengaruh besar terhadap keberhasilantujuan kemitraan. Oleh karena itu model kemitraan yang dapat digunakan untuk pengembangan pasar seharusnya tidak hanya melibatkan pemerintah daerah dan pihak swasta saja, tetapi juga melibatkan dan memberdayakan para pedagang yang ada di pasar tersebut².

²Setiawan, Tomi dan Sukma Egnas. 2012. *Public Private Partnership as a Public Service Dilemma*, dalam BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 19, No 3 Tahun 2012. Dalam

Pasar tradisional di Kabupaten Sumedang saat ini mulai mengalami degradasi fungsi. Hal ini terlihat dari kondisi gedung pasar yang sudah tidak layak, tidak beraturan dan kumuh. Selain itu, semakin banyaknya pasar modern juga menjadi penyebab degradasi fungsi pasar tradisional. Masyarakat lebih memilih berbelanja ke pasar modern karena kenyamanan dan kebersihan. Saat ini perbandingan jumlah pasar modern dan pasar tradisional di Kabupaten Sumedang cukup signifikan. Pasar modern yang ada di Sumedang berjumlah sekitar 67 unit meliputi minimarket dan supermarket, sedangkan jumlah pasar tradisional dibawah binaan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang hanya 11 unit saja.

Berdasarkan kondisi tersebut, sejak tahun 2011 pemerintah daerah Kabupaten Sumedang berinisiatif untuk merencanakan pengembangan dan pembangunan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sumedang. Pengembangan pasar ini dilakukan mengingat persaingan pasar yang semakin meningkat di Indonesia. Studi kelayakan yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumedang menghasilkan keputusan untuk melaksanakan

pengembangan pasar tradisional agar mampu bersaing dengan pasar modern.

Dalam pengembangan pasar ini, pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak swasta beserta masyarakat untuk mengelola dan memberdayakan pasar tradisional. Kerjasama ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa kerjasama daerah merupakan kesepakatan dalam hal ini antara bupati dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Dalam pengembangan pasar ini, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang tentunya juga harus melibatkan para pedagang pasar. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 8, dijelaskan bahwa pemerintah daerah bertugas untuk melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, pelaku pasar, dan instansi terkait agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan dan pemberdayaan pasar. Selain itu, dalam peraturan daerah tersebut pasal 31 juga dijelaskan bahwa pedagang berhak untuk berpartisipasi

dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan pasar.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama dibidang pelayanan publik dan organisasi manajemen melalui kebijakan publik. Administrasi publik saat ini dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik dan juga mengembangkan praktik-praktik 'co-production'³ agar pelaksanaan kegiatan administrasi publik dapat efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan.

Vigoda-Gadot (2002) mengidentifikasi tiga ruang lingkup dalam studi administrasi publik yaitu *political science and policy analysis, sociology and cultural studies, and*

³Dalam buku *Public Management and Governance* karya Tony Bovaird, Elke Löffler (2009), terkait perubahan konteks kebijakan publik menjelaskan "It is important to distinguish 'co-production' from public consultation and public participation. Here, coproduction is considered as the most intensive form of citizen engagement where the focus is on joint action, whereas public participation involves mainly communication processes with joint decision-making and public consultation involves mainly listening. The definition above includes these activities as part of 'co-production' as long as they entail the public making important contributions, which are being used by the public sector."

organization management and the business yang juga terdiri dari *the Organizational Behavior (OB) and Human Resource (HR) subdivisions*. Dalam hal ini administrasi publik tidak hanya terkait dengan ilmu politik dan analisis kebijakan, tetapi juga pemahaman mengenai dinamika kelompok dan struktur informal serta pendekatan kerjasama untuk menyediakan layanan publik.

Administrasi publik merupakan kegiatan melayani masyarakat. Pemerintah melaksanakan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan aspek manajemen, untuk melaksanakan kegiatan administrasi publik. Mullin (1996) menjelaskan bahwa, "*Management does include administration, but also involves organization to achieve objectives with maximum efficiency, as well as genuine responsibility for results*".

Definisi tersebut bermakna bahwa tidak hanya manajemen yang termasuk dalam administrasi tetapi juga melibatkan organisasi untuk mencapai tujuan dengan efisien. Lebih lanjut Minogue (1998) menambahkan beberapa hal terkait proses administrasi publik selain efisiensi, bahwa, "*modern public administration is not just about efficiency;*

italsoinvolvesideas of democraticparticipation, accountability and empowerment".Ini berarti dalam administrasi publik modern, pelaksanaan kegiatan untuk melayani publik tidak hanya untuk menciptakan efisiensi tetapi juga menyangkut peningkatan partisipasi, akuntabilitas dan pemberdayaan. Seiring dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang semakin berkembang membuat pemerintah harus mampu menampung aspirasi masyarakat dan juga melibatkan aktor lain yang ingin berpartisipasi agar tersedianya layanan publik yang berkualitas.

Seiring dengan perkembangan paradigma administrasi publik, segala bentuk kerjasama untuk menciptakan layanan publik telah mulai dilaksanakan. Sejak tahun 1990-an, paradigma administrasi publik telah berkembang menjadi *Governance*. Paradigma *governance* adalah tentang pentingnya interaksi aktor pemerintah dan non-pemerintah dipandu dan diarahkan dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Sebagaimana dijelaskan VasudhaChhotrayand Gerry Stoker bahwa:

Governance adalah tentang aturan pengambilan keputusan kolektif dalam pengaturan di mana ada sejumlah aktor atau organisasi dan di mana tidak ada sistem kontrol

resmi dapat mendikte hubungan antara aktor dan organisasi. (Chhotray dan Stoker, 2009)

Governance merupakan proses mengendalikan kegiatan organisasi dan hubungan dengan para pemangku kepentingan internal maupun eksternal. Menjelajahi konteks, dinamika, dan wacana paradigma *governance* yang telah menyoroti hubungan dan interaksi antara skala spasial yang berbeda dan berbagai aktor dan lembaga. Dalam Osborne dijelaskan bahwa :

Governance merupakan sebuah konsep yang menyeimbangkan peran, tanggung jawab, akuntabilitas dan kemampuan: berbagai tingkat pemerintahan lokal, nasional, regional dan global serta aktor yang berbeda atau sektor dalam masyarakat, *public, private and civil society organizations* dan warga negara. (Osborne, 2010)

Kemitraan sering kali dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Dalam Glasbergen, *etal* dijelaskan bahwa:

Kemitraan digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis hubungan, terkadang mengacu pada hubungan antara pemerintah saja, tetapi juga hubungan antara aktor dari sektor-sektor lain dari masyarakat, seperti pelaku pasar atau masyarakat sipil. (Glasbergen, *etal*, 2007)

Kemitraan merupakan suatu hubungan antar sektor yang mencakup perorangan, kelompok, atau organisasi

yang setuju untuk bekerjasama memenuhi kewajiban atau mengerjakan tugas tertentu, menanggung resiko, dan manfaat bersama, meninjau kembali hubungan secara teratur, dan merevisi persetujuan sesuai kebutuhan. Seperti yang dijelaskan Stratton dalam Osborne bahwa Kemitraan merupakan kerjasama antara pihak swasta, organisasi sosial, dan pemerintah di mana risiko, sumber daya dan keterampilan dibagi dalam pengembangan yang menguntungkan pihak serta masyarakat. (Osborne, 2010)

Kemitraan tiga sektor pada umumnya didorong oleh pencampuran antara motif *self-interest* dengan keinginan untuk mewujudkan kebaikan bersama (Selsky dan Parker dalam Dwiyanto, 2008). Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menjawab berbagai masalah sosial yang semakin kompleks dan tidak memungkinkan untuk diselesaikan oleh masing-masing institusi ataupun oleh kerjasama antara pemerintah dengan salah satu sektor lainnya.

Dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat maka pemerintah melibatkan berbagai aktor yaitu pihak swasta, dan organisasi sosial masyarakat untuk bekerjasama dalam penyediaan layanan publik. Urgensi dari kerjasama ini adalah untuk mengatasi

keterbatasan pemerintah baik dari sumber daya dan sarana prasana dalam menyediakan kebutuhan publik. Salah satu bentuk kerjasama yaitu *Public Social Private Partnership* (Kemitraan antara pemerintah, organisasi sosial, dan swasta).

Public Social Private Partnership (PSPP) adalah bentuk kemitraan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat sosial dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan layanan publik untuk menciptakan perlindungan sosial dan untuk memperbaiki kehidupan orang-orang yang termajinalkan. Sebagaimana dijelaskan Fandel bahwa:

Public Social Private Partnership (PSPP) dipahami bahwa lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan swasta, yayasan dan individu swasta bersama-sama melaksanakan proyek yang meningkatkan kesejahteraan dan berorientasi sosial. (Fandeleetal, 2012).

Public Social Private Partnership merupakan salah satu penerapan administrasi publik dalam paradigma *governance*. PSPP ini merupakan kerjasama antara pemerintah, swasta dan organisasi sosial dimana pemerintah sebagai *leadingsector*, pihak swasta sebagai penyedia modal investasi (pembiayaan), dan organisasi sosial sebagai penerima layanan publik. *Public*

Social Private Partnership melibatkan organisasi sosial untuk pengembangan dan pelaksanaan tujuan sosial. Dua karakteristik utama dari PSPP yaitu :

- a. Tujuan sosial: Melaksanakan kegiatan untuk perlindungan, dukungan dan peningkatan kesempatan bagi orang-orang yang kurang beruntung atau kelompok orang yang kurang beruntung.
- b. Implementasi dalam kemitraan: Konsep kemitraan antara *public*, pihak swasta, dan organisasi sosial ekonomi.

(Leonhardt *et al*, 2007)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prinsip-prinsip untuk menilai keberhasilan *Public Social Private Partnership* yang diungkapkan oleh Leonhardt *et al*, (2007) yang terdiri dari transparansi dan komitmen, pengawasan pelaksanaan kemitraan, proses negosiasi, dan kesetaraan peran dalam kemitraan. Melalui empat prinsip tersebut, akan mampu menjelaskan pelaksanaan *Public Social Private Partnership* antara pemerintah, pihak swasta, dan organisasi masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang pada hakikatnya bertujuan untuk mencari jawaban atas pertanyaan dengan mengumpulkan bukti-bukti. Penelitian ini dilakukan secara intensif

dimana peneliti mengamati apa yang terjadi di lapangan, mencatat segala hal yang terjadi dengan teliti, melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan di lapangan dan kemudian dituangkan ke dalam laporan penelitian secara detail. Pendekatan kualitatif dinilai relevan pada penelitian ini karena fenomena yang terjadi yaitu *Public Social Private Partnership* yang tidak memungkinkan diukur secara tepat (dikuantifikasi), sehingga untuk pemahamannya diperlukan eksplorasi perspektif partisipan terkait. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara yaitu, observasi non partisipan, Wawancara, Studi pustaka dan dokumentasi.

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles and Huberman. Analisis data tersebut dilakukan dengan tiga langkah menurut Miles and Huberman (1994) yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). Selanjutnya, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk melihat keabsahan data. Bentuk triangulasi yang digunakan untuk menguji keabsahan data yang didapatkan

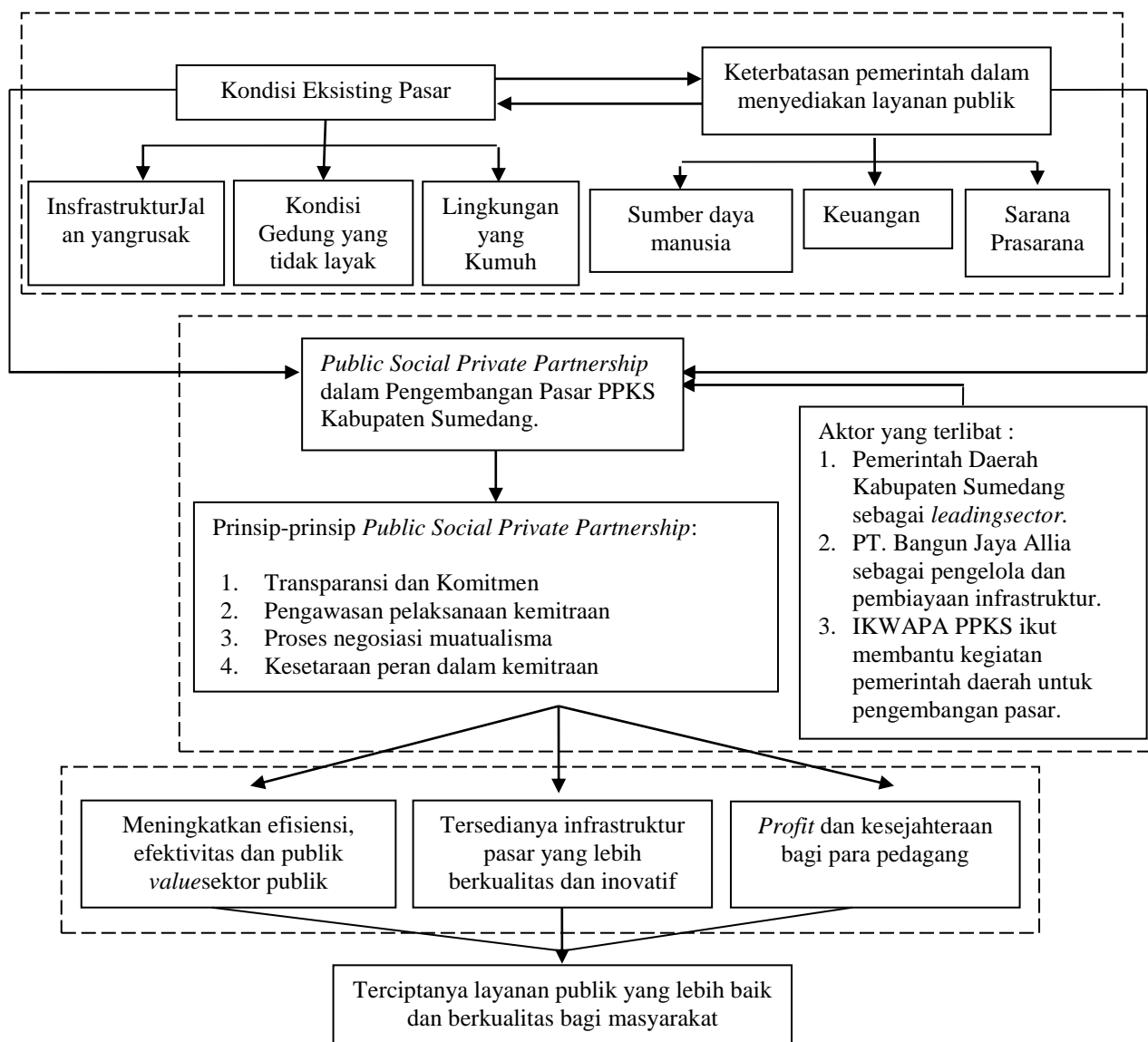
di lapangan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2007)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian.

Pada bagian ini, peneliti akan menjabarkan serta menganalisis data yang

telah diperoleh selama penelitian mengenai *Public Social Private Partnership* (PSPP) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, PT. Bangun Jaya Allia (PT. BJA), dan IKWAPA (Ikatan Kerukunan Warga Pasar) PPKS dalam pengembangan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sandang (PPKS) di Kabupaten Sumedang.



Gambar 1. Skema Penelitian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Sumedang pada tahun 2015 menunjukkan adanya penurunan yaitu sebesar 4,60 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 4,69 persen. Maka arah pembangunan perekonomian Kabupaten Sumedang dapat diprioritaskan melalui beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa pariwisata (BPS Kabupaten Sumedang, 2015).

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran merupakan sektor kedua setelah pertanian yang berperan dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sumedang. Perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Sumedang saat ini perlu ditingkatkan. Penguatan sektor perdagangan, hotel, dan restoran diarahkan dalam upaya penataan pasar modern dan revitalisasi pasar tradisional. Kebijakan yang ditujukan untuk penguatan penataan pasar salah satunya yaitu perlindungan dan pengembangan pasar tradisional. Oleh karena itu, dengan adanya penguatan sektor-sektor

pembangunan perekonomian maka diharapkan kinerja perekonomian Kabupaten Sumedang pada tahun-tahun mendatang dapat terlaksana dengan baik.

Kegiatan yang dapat dilakukan agar perekonomian mengalami pertumbuhan yaitu meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastuktur. Infrastruktur yang merupakan aset fisik untuk menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi akhir salah satunya yaitu pasar. Pasar memegang peranan penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaan pasar sangat besar manfaatnya bagi sebagian besar masyarakat karena merupakan tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014, pasar yaitu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu pihak baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sumedang sedang melakukan kegiatan pengembangan pasar tradisional untuk menciptakan infrastuktur pasar yang berkualitas.

Pasar tradisional berdasarkan Perdaterebut dijelaskan sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Kegiatan pengembangan pasar tersebut meliputi pengelolaan dan pemberdayaan pasar

tradisional. Pengelolaan pasar tradisional adalah pengelolaan seluruh potensi yang ada di wilayah pasar tradisional dan penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Sedangkan pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan seluruh potensi pasar serta melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Tabel 1. Pasar Tradisional Di Kabupaten Sumedang

| No. | Nama Pasar | Luas Lahan | Keadaan Fisik | | Jumlah Pedagang | | | Jumlah | | Ket. |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------|-----|-----------------|-----|-----|------------|-----------|------|
| | | | Kios | Los | Kios | Los | PKL | Kios Tutup | Los Tutup | |
| 1. | Pasar Inpres | 8.650 m ² | 353 | 312 | 348 | 291 | 450 | 5 | 21 | |
| 2. | Pasar PPKS Sandang | 11.812 m ² | 423 | - | 211 | - | 436 | 169 | - | |
| 3. | Pasar Tanjungsari | 14.000 m ² | 610 | - | 469 | - | 215 | 141 | - | |
| 4. | Pasar Parakanmuncang | 3.446 m ² | 233 | - | 189 | - | 150 | 42 | - | |
| 5. | Pasar Wado | 6.483 m ² | 232 | - | 195 | - | 30 | 37 | - | |
| 6. | Pasar Darmaraja | 4.200 m ² | 197 | - | 88 | - | 20 | 84 | - | |
| 7. | Pasar Conggeang | 2.000 m ² | 96 | 45 | 77 | 38 | 36 | 19 | 7 | |
| 8. | Pasar Buahdua | 1.400 m ² | 38 | 58 | 22 | - | 5 | 16 | - | |
| 9. | Pasar Ujungjaya | 1.400 m ² | 64 | - | 37 | - | 10 | 27 | - | |
| 10. | Pasar Cikeramas | 840 m ² | - | 41 | - | - | - | - | - | |
| 11. | Pasar Tolengas | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Sumber: Kabupaten Sumedang dalam Angka Tahun 2015

Pasar PPKS (Pusat Perbelanjaan Kota Sandang) Sumedang merupakan salah satu pasar yang cukup berpotensi untuk dikembangkan karena pasar ini terletak disalah satu kawasan strategis Kabupaten Sumedang dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu

kawasan perkotaan Kabupaten Sumedang. Pasar yang dibangun pada tahun 1988 memiliki tanah seluas 11.812 m² dan merupakan pasar terluas kedua di Kabupaten Sumedang. Jenis barang yang didagangkan berupa sandang, elektronik,

perhiasan, dan sejenisnya dengan jumlah 423 kios dan 436 PKL.

Pasar ini terletak di pusat kota Kabupaten Sumedang dan keberadaannya sangat strategis sebagai penyedia kebutuhan masyarakat. Hampir seluruh masyarakat dari wilayah Kabupaten Sumedang mengunjungi pasar ini karena dianggap sebagai pusat perdagangan. Pasar ini dilalui trayek angkutan umum dalam kota yaitu jalur trayek Sumedang-Paseh, Sumedang-Kadipaten, Sumedang-Tanjung Sari, Sumedang-Cileunyi, Sumedang-Situraja, Sumedang-Wado, Sumedang-Rancakalong, serta trayek antar kabupaten yaitu Bandung-Majalengka-Cirebon.

Pada saat penelitian ini berlangsung, kondisi gedung di pasar PPKS sudah tidak layak, hasil observasi menunjukkan bahwa dinding-dinding pasar yang sudah keropos. Selain itu tiang-tiang penyangga gedung sudah terlihat rapuh. Atap gedung pasar yang terbuka juga menjadi penyebab pasar menjadi becek jika curah hujan tinggi. Selain di dalam gedung pasar, kondisi infrastruktur jalan di sekitar pasar juga tidak memadai. infrastruktur jalan disekitar pasar banyak yang berlubang. Jika musim hujan telah tiba, lubang ini

akan menimbulkan genangan air dan tentu akan menyebabkan pasar menjadi kumuh dan mengganggu kenyamanan konsumen saat berbelanja. Selain itu, jumlah PKL di sisi luar gedung juga menjamur. Banyaknya PKL membuat kondisi pasar semakin sempit dan tidak beraturan.

Melihat kondisi pasar, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang membuat kebijakan untuk melakukan pengembangan pasar agar mampu bersaing dengan pasar modern. Latar belakang pengembangan pasaryaitu terkait dengan misi Kabupaten Sumedang untuk mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh dan bertumpu pada potensi sumber daya daerah yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kaitan dengan peningkatan infrastruktur perekonomian daerah tidak terlepas dari unsur-unsur penunjang aktivitas perekonomian seperti barang, modal, pasar, sarana prasarana, transportasi, dan infrastruktur lainnya. Maka dari itu, diperlukan pembenahan infrastruktur pasar tradisional di daerah karena akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam melakukan pembangunan suatu daerah, pemerintah

seringkali dihadapkan pada keterbatasan dalam menciptakan infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat. Keterbatasan tersebut terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana. Keterbatasan tersebut harus diatasi oleh pemerintah melalui kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta dan organisasi sosial. Kemitraan antar aktor ini memiliki beberapa manfaat diantaranya:

1. Menciptakan efektif dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 2. Penyediaan infrastruktur yang lebih cepat.
 3. Tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana yang lebih inovatif.
 4. Terciptanya infrastruktur yang berkualitas bagi masyarakat.
- (Glasbergen, etal, 2007)

Oleh karena itu, kemitraan antara pemerintah, organisasi sosial, dan pihak swasta atau *Public Social Private Partnership* merupakan kegiatan yang penting untuk mengatasi keterbatasan pemerintah dalam menyediakan infrastruktur.

Kemitraan ini terjadi karena adanya rencana pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang terkait dengan pengembangan pasar untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pasar agar memberikan

kenyamanan bagi warga pasar. Pemerintah tersebut telah melakukan studi kelayakan pasar Sumedang yang menghasilkan rekomendasi bahwa pasar Sumedang Kota memerlukan adanya penataan termasuk pengaturan sistem penempatan kios dan penanganan PKL.

Pengembangan pasar PPKS yang merupakan salah satu kegiatan pembangunan daerah dengan melibatkan pihak ketiga dan organisasi sosial sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat. Pemerintah sebagai *leadingsector* telah memilih PT. BJA untuk menjadi investor pengembangan pasar PPKS. Kerjasama yang dilakukan antar Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan PT. BJA dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam penelitian ini yaitu perusahaan swasta berbadan hukum PT. BJA. Selain melibatkan pihak ketiga, pemerintah juga melibatkan IKWAPA yang merupakan organisasi sosial yang menaungi seluruh aspirasi pedagang pasar. Saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten

Sumedang, PT. Bangun Jaya Allia, dan IKWAPA telah bermitra untuk pengembangan pasar PPKS. Hubungan yang baik antara pemerintah, pihak swasta, dan IKWAPA tentunya akan menjadi jalan keluar untuk terlaksananya pengembangan pasar dan tersedianya infrastruktur pasar yang berkualitas.

Kemitraan dalam pengembangan pasar PPKS Kabupaten Sumedang antara pemerintah dan swasta ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor 511/PKS.50-Huk/2013. Perjanjian kerjasama untuk jangka waktu 25 tahun tersebut ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2013. Selain itu, organisasi sosial dalam hal ini IKWAPA Pasar PPKS juga dilibatkan dalam pengembangan pasar ini karena IKWAPA menjembatani hubungan antara sesama warga pasar dengan pemerintah dan memiliki peran serta dalam membantu tugas pengelolaan pasar dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan pasar.

Maksud diadakannya kemitraan dalam pengembangan pasar adalah untuk menciptakan pasar yang representatif, tertata secara baik, bersih, tertib, aman dan nyaman yang didukung dengan sarana prasarana penunjang yang baik dan memadai di Kabupaten Sumedang

yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan warga pasar Sumedang Kota. Berdasarkan maksud tersebut, maka kemitraan dalam pengembangan pasar ini memiliki tujuan untuk:

1. Membangun dan mengelola pasar Sumedang Kota secara profesional agar dapat terpelihara,
2. Sebagai upaya peningkatan pelayanan kebutuhan masyarakat,
3. Menciptakan kondisi fisik pasar tradisional yang representatif,
4. Untuk menjaga dan mendorong eksistensi pasar tradisional di Kabupaten Sumedang,
5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
6. Menciptakan lapangan usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat, dan
7. Menciptakan kenyamanan bagi pedagang dan konsumen pasar Sumedang Kota.

3.2 Pembahasan.

3.2.1 Transparansi dan Komitmen Para Pihak.

Dalam prinsip ini dijelaskan bahwa terjaminnya akses dan kebebasan bagi setiap pihak untuk memperoleh informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan baik informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaan serta tujuan yang hendak dicapai. Keberhasilan kemitraan dalam pengembangan pasar ini ditentukan dengan bagaimana setiap aktor yang terlibat dapat mengetahui maksud dan

tujuan dari pengembangan pasar tersebut. Selain itu juga harus mengetahui manfaat dan risiko dari kemitraan ini. Informasi terkait kebijakan atau kegiatan pemerintah juga harus tersampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat agar tidak terjadi miskomunikasi antar pihak.

Pasar merupakan tempat pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan sebagai penggerak perekonomian masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan pengembangan pasar melihat kondisi pasar yang sudah tidak beraturan dan kondisi gedung yang mulai rapuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembang Bidang Pasar Daerah Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan bahwa pengembangan pasar ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing pasar dan taraf hidup masyarakat. Bangunan pasar saat ini sudah tidak layak dan fasilitas juga tidak memenuhi. Jika kondisi pasar dibiarkan seperti ini tentunya lama-kelamaan pasar tradisional akan punah⁴.

Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan dari IKWAPA. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekretaris IKWAPA PPKS

mengatakan bahwa mereka setuju dengan kegiatan pemerintah untuk pengembangan pasar mengingat warga pasar tradisional yang sudah sulit bersaing dengan pasar modern yang sekarang sudah menjamur. Konsumen saat ini banyak berbelanja ke pasar modern karena mereka sudah tidak mempermasalahkan harga, akan tetapi memerlukan kenyamanan saat berbelanja. Apalagi jika dihubungkan dengan pasar bebas saat ini, tentunya harus mempersiapkan diri agar mampu bersaing dengan para pedagang dari luar. Jika seluruh pedagang mampu untuk memahami pentingnya pengembangan pasar ini, tentu pengembangan pasar akan terlaksana tanpa adanya kendala⁵.

Terkait pengembangan pasar yang dikerjasamakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan, bahwa pemerintah menggandeng pihak ketiga dalam pengembangan pasar ini adalah karena setelah dibuat perhitungan, APBD Kabupaten Sumedang tidak cukup untuk melakukan pengembangan pasar. Pemerintah mengambil langkah cepat dengan menggandeng pihak ketiga agar pembangunan pasar dapat disegerakan⁶. Berdasarkan hasil wawancara dengan

⁴Wawancara, Juni 2015, di Sumedang.

⁵Wawancara, Juli 2015, di Sandang.

⁶Wawancara, Juni 2015 di sumedang

sekretaris IKWAPA PPKS, bahwa awalnya warga pasar sebenarnya ingin pengembangan pasar dilaksanakan oleh pemerintah dengan pertimbangan dari sisi harga pasti lebih murah. Namun, akibat keterbatasan dana tersebut, akhirnya pedagang menerima kalau pengembangan diserahkan kepada pihak ketiga. Akan tetapi, tidak seluruh pedagang setuju dengan pengembangan pasar yang dikerjasamakan ini. Banyak terjadi pro dan kontra dari masyarakat⁷.

Keterlambatan pemindahan pedagang ke TPS memperlihatkan bahwa tidak adanya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah, PT. BJA, dan IKWAPA untuk melakukan eksekusi pemindahan pedagang. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan pasar tentunya pemerintah, PT. BJA, dan IKWAPA PPKS harus melakukan tindakan korektif terhadap kendala pemindahan pedagang yang dihadapi. Untuk mendapatkan persetujuan dari pedagang tentu diperlukan keterbukaan informasi yang lebih agar seluruh warga pasar dapat memahami pentingnya pengembangan pasar ini.

Komitmen juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komitmen merupakan keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan, seluruh pihak yang terlibat harus memiliki komitmen dan tanggung jawab untuk mampu menyelesaikan pekerjaan. Tanpa adanya komitmen dari seluruh pihak, pasti akan ditemukan berbagai kendala terkait pengembangan pasar.

Dalam suatu kemitraan, seluruh pihak yang terlibat harus memiliki komitmen untuk mematuhi seluruh kesepakatan yang ada dan menyelesaikan kegiatan agar tercapainya tujuan. Komitmen dari pemerintah dan PT. BJA dijelaskan dalam surat perjanjian kerjasama Nomor 511/PKS.50-Huk/2013. Dalam surat tersebut dijelaskan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dan PT. BJA selama kegiatan pengembangan pasar. Kewajiban tersebut dibuat berdasarkan hasil kesepakatan bersama dan tentu harus dilaksanakan. Selain itu, komitmen dari IKWAPA sebagai organisasi sosial juga sangat diperlukan. Sebagai organisasi yang menaungi seluruh aspirasi warga pasar, IKWAPA harus mampu menciptakan kelestarian pasar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan

⁷Wawancara, juli 2015 di Sandang.

bahwa untuk untuk menertibkan lingkungan pasar dan mengatasi penolakan dari pedagang, pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat untuk mencari solusi agar pengembangan pasar dapat segera dilaksanakan⁸. Namun berbeda pandangan yang disampaikan oleh sekretaris IKWAPA bahwa pemerintah dianggap kurang tanggap dalam mengatasi kendala yang terjadi selama proses pengembangan pasar. Permasalahan yang ada di pasar dibiarkan berlarut-larut dan tidak ada tindak tegas dari pemerintah⁹.

Komitmen dalam setiap organisasi yang bermitra tentu diperlukan agar pelaksanaan pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Jika salah satu dari organisasi yang bermitra tidak memiliki komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tentu kemitraan tersebut akan mengalami kegagalan. Dalam hal, pemerintah sudah seharusnya melakukan tindakan tegas agar pengembangan pasar dapat terlaksana secepatnya. Jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah tentu akan merugikan banyak pihak, tidak hanya PT. BJA tetapi juga dapat merugikan pedagang pasar yang telah

pindah ke tempat penampungan sementara.

3.2.2 Pengawasan dalam Pelaksanaan Kemitraan.

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kerjasama yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan pengembangan pasar oleh pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah Daerah, pihak swasta (PT. BJA), IKWAPA beserta masyarakat harus mengawasi pelaksanaan pengembangan pasar untuk memastikan bahwa pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi penyimpangan. Setiap tahapan dalam pengembangan pasar perlu diawasi agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala seksi pengembangan bahwa tahapan pengembangan pasar yaitu dengan membuat kebijakan untuk melakukan kegiatan pengembangan pasar mengingat kondisi pasar yang sudah tidak beraturan. Pemerintah kemudian melakukan sosialisasi kepada IKWAPA beserta masyarakat. Setelah adanya persetujuan dari masyarakat, pemerintah mencari mitra kerja dari pihak ketiga dan setelah terpilihnya PT.

⁸Dokumen Wawancara, Juni 2015.

⁹Dokumen Wawancara, Agustus 2015.

BJA, maka pihak swasta akan melakukan pembangunan¹⁰.

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Kantor Pemasaran PT. BJA dalam wawancara bahwa setelah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, tahapan pengembangan pasar yang dilakukan oleh PT. BJA adalah mengurus izin-izin dan analisis dampak lingkungan, pembangunan TPS, pemindahan para pedagang ke TPS yang dibantu oleh pemerintah, penghancuran gedung lama, pembangunan pasar bernuansa semi modern, pemindahan pedagang dari TPS ke pasar pasca pembangunan, pengelolaan oleh pihak ketiga, dan penyerahan kembali kepada Pemerintah Daerah setelah waktu kerjasama berakhir¹¹. Hal yang sama juga disampaikan oleh sekretaris IKWAPA. Pengawasan perlu dilakukan dalam setiap tahapan pengembangan agar kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan dapat diketahui dan dicarikan solusinya¹².

Wewenang pemerintah dalam pengawasan pengembangan pasar yaitu mengawasi pembangunan pasar yang dilakukan oleh pihak swasta dan

mengawasi ketertiban lingkungan pasar agar terbebas dari PKL. Apabila terdapat penyimpangan, maka pemerintah berhak melakukan pengawasan yang dapat memberikan tindakan korektif dalam pelaksanaan pengembangan pasar sehingga dapat terlaksana dengan lancar.

Tidak hanya pemerintah yang memiliki hak untuk melakukan pengawasan. Untuk terciptanya keselarasan dalam kemitraan pengembangan pasar, PT. BJA dan IKWAPA PPKS juga melakukan pengawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pemasaran PT. BJA, bahwa PT. BJA juga melakukan pengawasan kegiatan pengembangan pasar. Pengawasan dilakukan oleh *project manajer* dengan melakukan pemantauan langsung ke pasar PPKS dan melihat kondisi yang ada. Jika terjadi kendala atau masalah, informasi-informasi yang didapat kemudian disampaikan kepada perusahaan dan dievaluasi bersama¹³.

Selain itu, sekretaris IKWAPA dari hasil wawancara juga mengatakan bahwa IKWAPA juga melakukan pengawasan. IKWAPA membentuk panitia pengawalan pembangunan sebanyak 20 orang yang terdiri dari

¹⁰Dokumen Wawancara, Juni 2015.

¹¹Dokumen Wawancara, Juni 2015.

¹²Dokumen Wawancara, Agustus 2015.

¹³Dokumen Wawancara, Juni 2015.

IKWAPA, pemilik kios, PKL, beserta masyarakat untuk mengawasi pengembangan pasar. Panitia ini melihat sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan pengembang dalam melaksanakan kegiatan pengembangan pasar. Dengan dibangunnya TPS, panitia pengawalan pembangunan meninjau apakah pembangunan tersebut sesuai dengan kesepakatan. TPS yang dibangun diharapkan mampu bertahan selama masa pembangunan pasar dilaksanakan. Setiap terjadi masalah terkait pengembangan pasar, panitia melalui IKWAPA menyampaikan kepada pemerintah dan pihak swasta¹⁴. Peran serta IKWAPA dalam pengelolaan pasar ini selaras dengan AD dan ART IKWAPA PPKS, yang menyatakan bahwa IKWAPA berperan serta dalam membantu tugas pengelolaan pasar dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan pasar.

3.2.3 Proses Negosiasi

Terkait pengembangan pasar tersebut tentunya pemerintah melakukan negosiasi dan musyawarah kepada para pedagang. Berdasarkan hasil negosiasi dan musyawarah maka tertanggal 12

September 2012 didapatkan persetujuan dari warga pedagang pasar Sumedang Kota yang tertulis dalam surat pernyataan persetujuan Nomor 511.2/01/IKWAPA-Pasar/2012 dan Nomor 511.2/22/IKWAPA-Pasar/2012¹⁵. Berdasarkan hasil persetujuan tersebut diharapkan pelaksanaan pembangunan pasar dapat dilakukan secepatnya. Akan tetapi berdasarkan observasi di pasar, hingga saat ini pembangunan pasar belum terlaksana karena berbagai faktor serta penolakan dari sebagian pedagang pasar. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris IKWAPA PPKS mengatakan bahwa negosiasi dan musyawarah bersama warga pasar terkait pengembangan pernah dilakukan,

¹⁵Dalam Dokumen terbaru (tahun 2016) terkait Putusan Nomor 330/PDT/2016/PT.BDG, dijelaskan bahwa Surat Pernyataan Persetujuan Warga Pedagang Pasar Sumedang Kota Nomor: 511.2/01/IKWAPA-PASAR/2012 Jo. Nomor : 511.2/22/IKWAPAPASAR/2012 tertanggal 12 September 2012, yang menjadi dasar dibuatnya Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia Nomor : 511/PKS.50-Huk/2013 Nomor : 1818/BJA/IX/2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang dan juga Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT. Bangun Jaya Allia No. 511.2/NK.13-Huk/2013 Nomor : 19/I/BJA/2013 tentang : Revitalisasi Pembangunan Pasar Sumedang Kota, Kabupaten Sumedang, adalah tidak benar serta merupakan Rekayasa. Lihat Selengkapnya dalam: http://pt-bandung.go.id/uploads/file/perkara_perdata/2016/September/330_Pdt_2016_PTB.

¹⁴Dokumen Wawancara, Agustus 2015.

meskipun masih terdapat beberapa persoalan yang tidak sepenuhnya disepakati bersama¹⁶.

Beberapa pedagang kemudian memunculkan berbagai alasan untuk menolak pengembangan pasar. Salah satu faktor pemicu penolakan pedagang adalah hak guna bangunan yang masih berlaku. Sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan mengatakan bahwa terkait HGB yang masih berlaku, pemerintah, investor dan IKWAPA serta tokoh pedagang telah melakukan negosiasi terkait hal tersebut. Dari hasil musyawarah didapatkan kesepakatan bahwa pedagang yang masih memiliki hak guna bangunan akan mendapat kompensasi dalam bentuk uang muka terhadap kios baru pasca pengembangan pasar¹⁷. Akan tetapi saat ini masih ada pedagang yang tidak mau pindah ke TPS dengan alasan hak guna bangunan yang masih berlaku¹⁸.

Penentuan *Lay Out* pasar juga melalui proses negosiasi yang panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris IKWAPA bahwa penentuan gambar atau *design* pasar membutuhkan

waktu lebih dari 4 bulan¹⁹. Setiap kesepakatan yang diambil dinegosiasikan dan disosialisasikan kembali kepada warga pasar. Setelah melalui proses yang panjang maka didapat kesepakatan *design* pasar. Dalam pengembangan pasar ini pemerintah, PT. BJA, dan IKWAPA serta warga pasar telah melakukan negosiasi agar pelaksanaan pengembangan dapat terlaksana dengan adanya kesepakatan dari seluruh pihak yang terlibat. Akan tetapi proses negosiasi belum menemukan kesepakatan dengan pedagang. Masih terjadi penolakan dari beberapa pedagang terkait harga dan hak guna bangunan. Musyawarah antara Pemerintah, PT. Bangun Jaya Allia, IKWAPA beserta warga pasar perlu dilakukan agar dapat menemui kesepakatan dari seluruh pihak.

3.2.4 Kesetaraan Peran

Pemerintah Daerah Kabupaten sejauh ini melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengembangan bahwa setiap pihak dalam kemitraan telah memiliki peran masing-masing. Peran yang dilaksanakan ini merupakan

¹⁶Dokumen Wawancara, Agustus 2015.

¹⁷Dokumen Wawancara, Juni 2015.

¹⁸Lihat kembali Dokumen Putusan Nomor 330/PDT/2016/PT.BDG, dalam http://pt-bandung.go.id/uploads/file/perkara_perdata/2016/September/330_Pdt_2016_PTB.

¹⁹Dokumen Wawancara, Agustus 2015.

kesepakatan bersama untuk terciptanya kesetaraan dalam pengembangan pasar. Dalam membuat kesepakatan, pemerintah, PT. BJA, IKWAPA beserta masyarakat berkumpul untuk menentukan kesepakatan bersama. Seluruh pihak yang terkait dalam kegiatan pengembangan pasarizinkan untuk mengeluarkan pendapat. Peran yang dilaksanakan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan surat perjanjian kerjasama²⁰.

Dalam kegiatan pengembangan pasar, pemerintah memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan strategi yang akan dilakukan. Pemerintah membuat kerangka acuan kerja tentang pengembangan pasar PPKS. Untuk melaksanakan pengembangan pasar, pemerintah menyelenggarakan proses pelelangan Badan Hukum Calon Mitra kerjasama dalam rangka rencana pengembangan pasar PPKS hingga terpilih PT. Bangun Jaya Allia sebagai mitra kerja. Dengan terpilihnya PT. BJA sebagai mitra kerjasama, pemerintah menyusun surat perjanjian kerjasama yang dirundingkan bersama PT. BJA, IKWAPA beserta tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian pemerintah beserta pengembang dan IKWAPA

melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah melalui dinas berkewajiban untuk menyebarluaskan data informasi pengelolaan pasar.

PT. BJA memiliki peran dalam pembangunan, penataan, pendanaan, dan pengelolaan pasar PPKS. Sejauh ini, PT. BJA telah melakukan penataan lokasi TPS dan membangun TPS disekitar Taman Endog (Patung Telor), jalan Tampomas untuk pemilik kios pasar. Selain itu, PT. Bangun Jaya Allia juga sudah melakukan pembangunan TPS di Jalan Ahmad Yani untuk para PKL. Terkait sumber pendanaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pemasaran PT. BJA bahwa sumber dana berasal dari aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan²¹. Untuk melakukan pembangunan pasar PPKS bernuansa modern, PT. BJA menggandeng pihak lain atau yang dikenal dengan subkontraktor. Akan tetapi, pembangunan pasar PPKS bernuansa modern belum dapat terealisasi mengingat pemindahan pedagang ke TPS yang belum dapat dilaksanakan.

²⁰Dokumen Wawancara, Juni 2015.

²¹Dokumen Wawancara, Juni 2015.

Sementara IKWAPA telah membantu pemerintah menyosialisasikan kegiatan pengembangan pasar. Selain itu, pengurus IKWAPA juga telah melakukan pendekatan kepada warga pasar agar kegiatan tersebut disetujui oleh seluruh warga pasar. IKWAPA juga berperan untuk penampung aspirasi masyarakat terkait pengembangan pasar. Setiap hal yang diinginkan oleh warga pasar disampaikan oleh IKWAPA kepada pemerintah dan investor melalui rapat dan diskusi. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris IKWAPA bahwa dalam pengembangan pasar, IKWAPA beserta tokoh masyarakat diundang dalam setiap rapat atau musyawarah. IKWAPA diberikan kesempatan untuk menyampaikan keinginan dari masyarakat. Terkait gambar yang dibuat oleh pengembang pun, IKWAPA dan masyarakat juga dapat mengkritisi dan mengoreksi sesuai dengan keinginan warga²². Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 bahwa peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui:

- a. Proses perencanaan dalam menyusun program beserta pengawasan evaluatif,

- b. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah,
- c. Proses perumusan kebijakan pengelolaan pasar,
- d. Pengawasan pengelolaan dan dapat melaporkan pada pihak berwenang bila terjadi kesalahan maupun pelanggaran pengelolaan.

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Simpulan

Public Social Private Partnership antara pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, PT. BJA, dan IKWAPA PPKS merupakan salah satu kegiatan untuk mengembangkan pasar PPKS dengan membangun pasar PPKS menjadi pasar semi modern dan untuk meningkatkan pelayanan kepada para pedagang dan pembeli. Kemitraan dalam pengembangan pasar PPKS Kabupaten Sumedang antara pemerintah dan swasta ditetapkan dalam Surat Perjanjian Nomor 511/PPKS.50-Huk/2013 yang ditandatangani pada tanggal 30 Januari 2013. Perjanjian kerjasama tersebut berisi tentang kesepakatan-kesepakatan yang mengikat para pihak sebagai wujud pelaksanaan keputusan bersama.

Proses kemitraan ini sudah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun namun pembangunan juga belum dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi dilema secara konseptual. Dimana dalam satu sisi adanya

²²Dokumen Wawancara, Agustus 2015.

kebutuhan untuk pelibatan multi-aktor dalam proses penyelenggaraan administrasi publik, akan tetapi disisi lain pelibatan ini berdampak pada proses yang lebih sulit dalam mempertemukan kepentingan diantara aktor-aktor yang terlibat,

4.1 Rekomendasi

1. Selama proses pelaksanaan pengembangan pasar pemerintah, PT. BJA, dan IKWAPA PPKS harus mampu melakukan tindakan korektif serta adanyaketegasan dari pemerintah agar permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pengembangan pasar dapat terselesaikan.
2. PT. BJA harus tetap melibatkan para pedagang dalam negosiasi terkait segala bentuk keputusan yang menyangkut kehidupan anggota IKWAPA seperti terkait dengan variasi bentuk bangunan, harga jual kios, dll, agar tidak terjadi resistensi.
3. Komunikasi yang intensif yang setara serta dilandasi nilai-nilai kejujuran antara Pemda Kabupaten Sumedang, PT. BJA, dan IKWAPA beserta tokoh masyarakat adalah mutlak dilakukan agar kendala-kendala pengembangan pasar dapat dikelola dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Kabupaten Sumedang. 2015. Kabupaten Sumedang dalam Angka Tahun 2015. Dalam: <https://sumedangkab.bps.go.id/index.php/publikasi/144>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
- ChhotrayVasudha dan Gerry Stoker. 2009. *GovernanceTheory and Practice: A Cross-DisciplinaryApproach*. Journal of PublicAdministration. Volume 87, Issue 4, pages 982–983, December 2009
- Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan GoodGovernance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- FandelGunter, AnkeGiese, BrigitteMohn. 2012. *MeasuringSynergyEffects of a Public Social Private Partnership (PSPP) Project*. International Journalof ProductionEconomics 140 (2012) 815–824.
- Glasbergen, Pieter, Frank Biermann, and Arthur Mol, editors. 2007. *Partnerships, Governance And Sus-tainable Development. Reflections on Theory and Practice*. Cheltenham: Edward Elgar.
- Hughes, Owen E. 2012. *Public Management and Administration: AnIntroduction*. Basingstoke, United Kingdom: PalgraveMacmillan.
- Leonhardt, Manfred, BrigitteKukovetz dan Martina Haas. 2007. *Public Social Private Partnership (PSPP)*. FH JOANNEUM GesellschaftmbH, Graz. Dalam <http://docplayer.org/26719364->

- Public-social-private-partnership-pspp-modell.html. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
- Miles, Matthew B dan Huberman, A Michael. 1994. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta. Universitas Indonesia Press.
- Minogue, M., C. Polidano and D. Hulme, editors. 1998. *Beyond the New Public Management: Changing Ideas and Practices in Government*. Cheltenham: Edwin Elgar.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Mullin, Rick. 1996. *Managing The Outsourced Enterprise*. Journal of Business Strategy, Vol. 17 Issue: 4, pp.28-36. Dalam: <https://doi.org/10.1108/eb039792>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
- Osborne, Stephen P. 2010. *The New Public Governance? : Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London, United Kingdom: Routledge.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dalam: http://jdih.sumedangkab.go.id/Produk/perda/2014/Peraturan.Daerah_2014_3.pdf. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah. Dalam: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/2007/pp50-2007.pdf>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
- Setiawan, Tomi dan Sukma Egnas. 2012. *Public Private Partnership as a Public Service Dilemma*, dalam BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Vol 19, No 3 tahun 2012. Dalam <http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/view/1855>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2015.
- Vigoda-Gadot, Eran. 2002. *Public Administration : An Interdisciplinary Critical Analysis*. Haifa, Israel: CRC Press.